

## Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban

Rini Kusumawati<sup>1\*</sup>, Supri Hartono<sup>2</sup>, Dida Rahmadanik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: : [1rinikusum87@gmail.com](mailto:rinikusum87@gmail.com), [2suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id), [3didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

10 Mei 2023

Received in revised form:

23 Mei 2023

Accepted:

18 Juni 2023

---

### Keyword:

Collaborative Governance,  
Tourism Village Management,  
Stakeholders.

### Kata Kunci:

Collaborative Governance,  
Pengelolaan Desa Wisata,  
Stakeholder.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to know and observe the process of Collaborative Governance in the management of Pelang tourism village in Tahulu Village, Tuban Regency. This research is important because the success of cooperation between stakeholders can reflect readiness to experience problems in the community. The method used in this study is qualitative descriptive with a Collaborative Governance theory approach developed by Balogh (2012). This research was conducted through a qualitative descriptive approach using documentation, observation, and structured interviews as a method of collecting data on 3 key informants, namely the Head of Tourism, Bank Jatim Staff, and the Head of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). The results of the study show that the Collaborative Governance process in the management of Pelang tourism village in Tahulu Village, Tuban Regency has run optimally. This can be seen from some aspects of collaborative governance according to Balogh, namely the dynamics of collaboration (communication, trust, commitment, and resources), collaborative actions (facilitating and advancing the collaboration process), and the impact and adaptation of the collaboration process (social impact).*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui serta mengamati proses Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban. Penelitian ini mempunyai pentingan karena keberhasilan kerja sama antara para pemangku kepentingan bisa mencerminkan kesiapan dalam mengalami permasalahan yang terdapat di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Balogh( 2012). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan dokumentasi, observasi, serta wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data terhadap 3 orang key informan, ialah Kepala Bidang Pariwisata, Staff Bank Jatim, serta Ketua Kelompok Sadar Wisata( Pokdarwis). Hasil penelitian menampilkan kalau proses Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal. Perihal ini terlihat dari sebagian aspek collaborative governance menurut Balogh, ialah dinamika kolaborasi( komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta sumber daya), tindakan- tindakan kolaborasi( memfasilitasi serta memajukan proses kolaborasi), dan dampak serta adaptasi dari proses kolaborasi( dampak sosial).



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

\* Corresponding author: [rinikusum87@gmail.com](mailto:rinikusum87@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Implementasi Otonomi Daerah yang nyata, merata serta bertanggung jawab, perlu dilakukan identifikasi sumber- sumber pendapatan wilayah buat menunjang pembiayaan penyelenggaraan negeri serta penerapan pembangunan wilayah yang mandiri. Undang- undang Otonomi Wilayah No 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah membagikan kewenangan kepada wilayah buat mengelola daerahnya sendiri cocok dengan kewenangan negeri yang diberikan kepada pemerintah wilayah. Dalam penerapan otonomi wilayah, di idamkan tiap wilayah bisa berkreasi dalam mencari arus pemasukan yang bisa digunakan buat menanggulangi pengeluaran administrasi wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengembangan bermacam zona. Wilayah dituntut buat mandiri dalam menghasilkan kemampuan wilayah yang profesional. Salah satu komponen pembangunan otonomi wilayah ialah zona pariwisata (Yogi, 2014). Sektor pariwisata ialah sektor yang membagikan keterlibatan besar terhadap perolehan devisa negeri. Oleh sebab itu Kementerian Pariwisata terus mengakselerasi perkembangan sektor pariwisata, dan banyak sektor lain yang berkembang bersamaan dengan kenaikan industri pariwisata (Asarani, 2019).

Pelang merupakan sebuah desa wisata di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi unik dan menarik untuk menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Tuban yang harus dikunjungi. Desa Wisata Pelang terletak di Desa Tahulu Kecamatan Merakurak. Desa Wisata Pelang merupakan desa wisata potensial dimana desa wisata tersebut memiliki fitur perkebunan sagu dan Sungai Pelang. Kegiatan yang ditawarkan kepada wisatawan di Desa Wisata Pelang berupa spot foto dengan wahana air perahu rakit dan ikan-ikan hias serta spot-spot lain yang telah disediakan. Pengelolaan Desa Wisata Pelang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Dimana pengelola tersebut harus mampu menjalankan kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Pelang, namun dependensi sumber daya manusia menjadi hambatan atau kendala di desa Wisata Pelang, dimana pendidikan rata-rata pengelola kelompok sadar wisata masih setingkat SMA serta belum memiliki pengalaman yang baik dalam dunia pariwisata. Hidup di era global membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, yaitu orang-orang yang kompetitif dalam arti positif, mampu berkolaborasi, berkreasi dan berinovasi, sehingga karya atau produk dapat bersaing untuk kualitas yang lebih baik (Sedarmayanti, 2014).

Pemerintah setempat juga bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ini merupakan masyarakat umum yang ada di kawasan destinasi wisata sebagai pemilik dari beraneka ragam sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Selain itu, Pemerintah setempat juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) dan Bank Jatim, dalam upaya memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) pengelolaan dan pengembangan industri kreatif. Pariwisata di Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban, serta berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar destinasi pariwisata melalui penyuluhan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga pariwisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Destinasi Wisata Pelang.

Berdasarkan analisis terhadap sumber data yang ada, permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah Desa Wisata Pelang belum berkembang dengan baik karena merupakan desa wisata yang kurang berkembang baik dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana maupun pengelolaan yang ada dan kualitasnya harus diperkuat dan ditingkatkan, serta menghadapi permasalahan seperti masalah kerjasama antar pihak yang masih belum optimal. Dengan pemikiran tersebut, maka pengelolaan Desa Wisata Pelang memerlukan collaborative governance dengan peran strategis dan sinergis antar pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa wisata yang sangat

rumit yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja agar desa wisata ini lebih baik dan lebih berkembang kedepannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, sebagai pertimbangan penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Pelang Kabupaten Tuban" dalam penulisan ini peneliti menjelaskan mengenai kolaborasi yang dilaksanakan antara pemerintah, dan masyarakat dalam pengelola Desa Wisata Pelang.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti memilah memakai tipe penelitian kualitatif karena bertujuan buat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami kerjasama dalam pengelolaan pariwisata dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan pariwisata. Tipe penelitian kualitatif dipilih sebab penelitian ini bertujuan buat memperoleh gambaran dan data yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan pariwisata dalam wujud collaborative governance. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam riset ini merupakan metode purposive sampling. Purposive sampling, seperti yang dipaparkan oleh (Sugiyono, 2017) merupakan metode pengambilan sampel ataupun sumber informasi dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, informan dipilih bersumber pada pertimbangan bahwa mereka mempunyai kuasa ataupun pengetahuan yang khusus terkait dengan sumber data yang dituju. Informan tersebut dipilih karna mereka mempunyai data yang relevan terhadap collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata, ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, Bank Jatim Cabang Tuban, serta pengelola objek wisata. Ada pula sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, ialah sumber data primer serta sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data model interaktif (interactive model analysis) yang dikemukakan oleh (A.Michael Huberman, 2014). Berikut merupakan penjelasan lebih mendalam serta perinci mengenai langkah- langkah analisis yang diambil: Pengumpulan Informasi, Reduksi Informasi, Penyajian Informasi, Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Stakeholder dimaknai selaku orang, kelompok ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan, keterlibatan, ataupun dipengaruhi oleh aktivitas ataupun program pembangunan. Pada pengelolaan pariwisata pemangku kepentingan dipecah jadi stakeholder utama selaku orang ataupun kelompok yang menunjang sangat berarti buat keberlangsungan hidup serta guna organisasi zona pariwisata, serta stakeholder sekunder selaku orang ataupun kelompok yang tidak berarti buat kelangsungan hidup organisasi namun yang di masa kemudian, saat ini ataupun pada waktu depan bisa pengaruhi ataupun dipengaruhi oleh organisasi (Saputra, 2020). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pelang melibatkan kepala Desa Tahulu sebagai bagian dari perangkat desa yang mempunyai peran sebagai motivator. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban juga sebagai stakeholder yang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata ada dan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Selain itu Bank Jatim merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai mitra pemerintah Kabupaten Tuban melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), program ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata.

Pada pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pelang belum ada keterlibatan swasta yang berperan secara langsung, seluruh pelayanan yang menyangkut wisatawan disediakan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari pengelolaan dan pelaku wisata. Masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wisata membentuk forum musyawarah berupa kelompok sadar wisata. Tujuan dibentuknya forum ini merupakan selaku sarana serta media tukar informasi, komunikasi, serta kerjasama antara pengelola wisata dalam mengembangkan wisata itu sendiri. Dengan demikian mempunyai tugas menampung serta mengantarkan aspirasi dan kasus yang terjalin pada wisata kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda serta Berolahraga Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti amati bahwasanya dalam pengelolaan dan pengembangan objek Desa Wisata Pelang melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan melibatkan pemerintah setempat, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Kelompok sadar wisata, masyarakat sekitar dan Bank Jatim sebagai pembantu yang ikut berpartisipasi. Pada pembahasan ini, akan dijelaskan bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan objek Desa Wisata Pelang di Kabupaten Tuban melalui aspek-aspek Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh.

### **Dinamika Sosial**

Beberapa peneliti menggambarkan proses kolaboratif sebagai fase linier yang berlangsung selama periode waktu yang panjang dari definisi masalah hingga penetapan agenda dan implementasi. Menurut (Emerson, Nabatchi, 2012) dalam teori (Collaborative Governance Regime) CGR, Dinamika proses kolaboratif dipandang sebagai siklus interaksi berulang yang berfokus pada empat indikator interaksi dinamis kolaboratif, yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan sumber daya. Peneliti mengamati kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Desa Wisata Pelangi, sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk secara bersama-sama mencari solusi. Hasil wawancara dengan pengelola Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban menunjukkan betapa pentingnya mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata dengan segala dinamikanya. Oleh karena itu, dinamika kerja sama ke depan menjadi sebuah tantangan, bukan hambatan. Seperti yang kita semua tahu, sangat sulit untuk menggabungkan minat, motivasi, keinginan, dan harapan yang berbeda.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang dapat disimpulkan sebagai salah satu langkah yang wajib ditempuh. Kolaborasi dalam pengelolaan Wisata Pelang juga berjalan dengan baik karena adanya langkah-langkah komunikasi yang dilakukan melalui diskusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Balogh kalau suatu kolaborasi wajib mempunyai landasan utama ialah komunikasi sebab perihal ini bisa mendukung dalam proses aktivitas kerja sama. Kerjasama dalam proses komunikasi bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan pariwisata. Diskusi dilakukan antara lembaga pariwisata seperti Dinas Pariwisata, Bank Jatim, dan kelompok sadar wisata. Tujuan dari diskusi antara ketiga pihak tersebut adalah menghasilkan ide dan solusi untuk pengembangan dan penyelesaian permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diskusi semacam ini perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya melibatkan dinas pariwisata tetapi juga pihak lain seperti Bank Jatim dan Kelompok Sadar Wisata yang dipimpin oleh Desa Wisata Pelang.

#### **b. Kepercayaan**

Kepercayaan yang dicoba dalam proses kolaborasi pengembangan wisata sudah terbangun sesuatu kepercayaan dengan sangat baik antara pemerintah, warga serta pula pengelola sebab awal mulanya objek Desa Wisata Pelang ini belum dikelola dan saat ini sudah dikelola dengan baik.

Dengan terdapatnya sosialisasi dan pembinaan secara langsung serta pula pemahaman mengenai bermacam manfaat yang bakal didapatkan hingga warga memberikan kepercayaan penuh buat pengelolaan serta pengembangan wisata tersebut kepada pengelola. Setelah itu dari pemerintah sudah memberikan kepercayaan buat pengelola dengan sediakan sebagian sarana serta fasilitas.

#### c. Komitmen

Komitmen dalam kerjasama pengelolaan Desa Wisata Pelang dapat terbentuk baik melalui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya maupun tanggung jawab masing-masing pihak yang telah disepakati dalam MOU dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban yang saat ini sedang melaksanakan beberapa program. Upaya pengembangan pariwisata di Pelang terus berlanjut hingga saat ini.

#### d. Sumber Daya

Sumber daya kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang bisa diambil kesimpulan cukup baik kalau sumber daya dalam pembagian peran serta waktu telah tercipta sebab bisa dilihat dari fakta kalau pihak yang berkolaborasi tidak sering lagi melaksanakan pertemuan buat mangulas perihal itu ketika terdapat aktivitas yang hendak dilakukan. Terlihat bahwa pertemuan untuk membahas masalah dan mengambil tindakan tidak sering dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Masalah ini masih belum sesuai dengan teori Balogh yang menyatakan bahwa kerjasama membutuhkan sumber daya, baik secara fisik maupun non-fisik.

### **Tindakan-Tindakan Kolaborasi**

Pada prinsipnya tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari akibat itu sendiri. Kerjasama dimotivasi oleh pemikiran bahwa mencapai tujuan akan sulit jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bekerja sendiri (Agranoff, R., 2003). Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka Collaborative Governance. Namun banyak peneliti yang kurang mengkaji dan memperhatikan lebih mendalam mengenai tindakan-tindakan kolaborasi. Menurut (Emerson, Nabatchi, 2012) Kegiatan kolaboratif merupakan inti dari manajemen kolaboratif, namun seringkali penelitian lebih berfokus pada kegiatan kolaboratif daripada tindakan kolaboratif itu sendiri.

Tindakan kolaborasi masyarakat yang efektif harus diungkapkan secara implisit melalui perumusan tujuan yang jelas (Donahue, 2011). Perihal ini disebabkan sulitnya melaksanakan aksi kerjasama bila tujuan yang mau dicapai lewat kerjasama itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas. Tindakan-tindakan kerja sama pada prakteknya sangat bermacam-macam seperti memfasilitasi, serta memajukan proses kerja sama. Setelah itu, hasil daripada aksi ini secara langsung bawa akibat sedangkan yang menuju kembali pada dinamika kerja sama, serta akibat jangka panjang. Bagi Huxam dalam Emerson (2012), sebagian aktivitas kolaboratif mempunyai tujuan yang sangat luas, semacam memastikan langkah strategis dalam isu ataupun bidang kebijakan. Tetapi banyak pula aksi kerja sama yang mempunyai tujuan kecil semacam proyek pengumpulan serta analisis data khusus. Sebagian aksi kolaboratif bisa dicoba oleh seluruh pemangku kepentingan secara bertepatan, sedangkan yang lain cuma bisa dicoba oleh pemangku kepentingan tertentu cocok dengan kapasitas tiap-tiap pemangku kepentingan.

#### a. Memfasilitasi

Dalam proses kolaborasi, memfasilitasi melibatkan kegiatan yang dapat memperjelas pemahaman, pengambilan keputusan, dan tindakan, baik melalui kerja sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain untuk memfasilitasi penyelesaian tugas. Fasilitas dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait juga harus tersedia untuk mendukung kolaborasi ini. bahwa peran dalam memfasilitasi kerjasama pengelolaan Wisata Pelang bertujuan untuk memperlancar dan memudahkan proses kerjasama. Upaya telah dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada

warga mengenai peran dan kontribusi mereka dalam pariwisata, serta memberikan saran teknis atau pelatihan kepada kelompok sadar pariwisata untuk meningkatkan keahlian dalam pengelolaan pariwisata. Secara keseluruhan, teori yang disampaikan oleh Balogh terbukti efektif karena memfasilitasi proses kolaboratif dan mempercepat implementasi kolaboratif.

#### b. Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam upaya untuk memajukan proses kerjasama, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata dan menjaga hubungan kerjasama yang telah terjalin agar dapat mencapai kondisi yang lebih baik serta memperkuat proses kerjasama dalam pengelolaan tersebut. Menurut hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk memajukan proses kerja sama sudah cukup baik. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi meliputi saling terbuka dalam berkomunikasi, memberitahu rencana yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai, dan mengadakan pertemuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa komunikasi antara mitra kerja sama harus terjaga dan pertemuan perlu diadakan lebih sering. Dengan demikian, percepatan kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang dapat diperkuat.

#### Dampak dan Adaptasi dari Proses Kolaborasi

Dampak sementara ataupun intermediate outcomes merupakan output dari aktivitas usaha yang diidentifikasi serta diukur dalam waktu yang pendek, dan ialah bagian dari indikator hasil jangka panjang. Akibat dari kerja sama yang terjalin pada pengembangan Wisata Pelang disaat ini memberikan dampak yang lumayan baik buat perkembangan wisata serta faktor di dalamnya. Dalam proses penelitian yang dicoba kesimpulannya hendak memberikan dampak. Hasil temuan Menampilkan dampak sementara dari adanya kolaborasi, ialah mulai terjadi pemahaman di antara para aktor kolaborasi bahwa untuk pembangunan Desa diperlukan kerjasama dari berbagai unsur masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada di Desa.

Sebelum jadi desa wisata, Pelang ialah dusun dengan sektor pertanian. Sebagian besar warga Dusun Pelang bermata pencaharian petani. Kehidupan warga di Dusun Pelang masih sangat baik. Dilihat dari banyak aktivitas serta pertemuan teratur bermacam kelompok warga, semacam gotong royong, kerja bakti. Pertumbuhan pariwisata di kawasan ini pasti saja memberikan sebagian dampak terhadap kehidupan sosial budaya serta ekonomi warga setempat. Warga yang lebih dahulu cuma tergantung pada pemasukan pertanian setelah itu hendak mempunyai kesempatan buat membangun usaha di bidang pariwisata. Dampak pengembangan pariwisata di kawasan wisata pelang terhadap aspek sosial serta ekonomi untuk warga serta kawasan tersebut antara lain:

#### a. Membuka lapangan pekerjaan baru

Pengembangan pariwisata di kawasan wisata pelang memberikan kesempatan untuk warga setempat buat memperoleh lapangan pekerjaan baru terpaut dengan aktivitas kepariwisataan.

#### b. Tingkatkan pemasukan warga setempat

Pengembangan pariwisata membagikan peluang untuk warga buat membuka usaha baru buat penuhi kebutuhan wisatawan semacam usaha kerajinan usaha kuliner serta sebagainya.

#### c. Menolong pengadaan serta revisi fasilitas serta prasarana pariwisata

Pembangunan pariwisata yang baik merupakan pembangunan yang didukung sarana fasilitas serta prasarana yang mencukupi pemasukan yang hendak diperoleh dari aktivitas pariwisata

nanti hendak bisa dimanfaatkan buat memenuhi serta membetulkan beberapa fasilitas serta prasarana penunjang pariwisata semacam toilet umum tong sampah rest area penerangan serta jaringan air bersih.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah peneliti lihat kalau Dampak dari kolaborasi yang dicoba pada pengelolaan serta pengembangan Wisata Pelang selama ini membagikan dampak multifier effect yang lumayan baik buat pertumbuhan wisata. Semua itu tercapai dengan terdapatnya keterlibatan pemerintah, swasta, serta masyarakat yang turut dan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Dengan terdapatnya pembinaan serta surveillance yang dicoba oleh pemerintah Dinas Pemuda Serta Berolahraga Kabupaten Tuban membuat kenaikan dalam memajukan kemampuan wisata yang terdapat. Kerjasama yang lagi berjalan dalam pengelolaan serta pengembangan wisata menciptakan kenaikan buat warga ataupun buat wisata itu sendiri dalam membagikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Dari pelayanan yang diberikan tersebut membagikan.

## KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pendekatan Collaborative Governance dalam mengelola desa wisata. Hal ini terlihat dari pola kerjasama dan komunikasi yang telah dijalin Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain pihak swasta dan masyarakat. Setiap aktor memberikan kontribusi sesuai dengan perannya. Selain itu, penguatan masyarakat diperkuat oleh kelompok sadar wisata di setiap desa wisata. Konsep Collaborative Governance yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban bertujuan untuk meningkatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar desa wisata dapat lebih optimal dalam pengembangannya dan membawa manfaat bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti memfokuskan pada pengelolaan kolaboratif desa wisata Pelang Kabupaten Tuban, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan Desa Wisata Pelang terlaksana dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak antara lain Dinas Pariwisata, Bank Jatim dan Kelompok Sadar Wisata. Pada indikator dinamika kolaborasi ini diantara lainnya dalam hal komunikasi, sumber daya, komunikasi, dan menjaga kepercayaan sudah berjalan dengan baik dan efektif.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang dalam memfasilitasi kolaborasi sudah maksimal sepenuhnya dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama sudah saling terbuka dalam memberikan informasi.
3. Dampak sosial pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata Desa Wisata Pelang khususnya dampak sosial terhadap proses kolaboratif pengelolaan wisata di Desa Wisata Pelang, berdampak berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wisata dan membuka peluang pendapatan bagi masyarakat dan sudah berjalan dengan signifikan karena kondisi pariwisata Pelang yang sudah berjalan dan berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, dan M. B. M. (2014). Analisis data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. UI Pres.
- Agranoff, R., and M. M. (2003). Collaborative Public Management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.
- Asarani, N. (2019). Hubungan Komunikasi Pemasaran Dan Promosi Dengan Keputusan Memilih Jasa Layanan Kesehatan. Hubungan Komunikasi Pemasaran Dan Promosi Dengan Keputusan Memilih Jasa Layanan Kesehatan, 53(9), 1689–1699.
- Donahue, J. dan Z. (2011). Collaborative Governance. Princeton New Jersey. (e-book): Princeton University Press.
- Emerson, Nabatchi, dan B. (2012). (2012). Integrative Framework For Collaborative Governance. Journal of Public Administration Reseach and Theory, 22(1).
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampong Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13, 88.
- Sedarmayanti. (2014). Manajemen Strategl. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Yogi. (2014). Analisis Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan Objek Wisata Danau Raja di Kabupaten Indragiri Hulu. In Repository Uin Suska Riau, 39(1).